

PADJADJARAN

Jurnal Ilmu Hukum
Journal of Law



0216-8227

ISSN: 0216-8227

Volume 1 No
April 2014

1

PADJADJARAN

Jurnal Ilmu Hukum
Journal of Law

ISSN 0216-8227

Volume 1 No 1 April 2014 Halaman 1 - 208

Alamat Redaksi:

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum
Jl. Dipati Ukur No. 35 Bandung 40132
Gedung 4 Lantai 2 Ruang L.2.09
Telp/Fax. (022) 2536488
E-mail: redaksi@jurnalpadjadjaran.co.id
Website: jurnalpadjadjaran.co.id

Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum adalah jurnal ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran tiga kali setahun pada bulan April, Agustus, dan Desember. Jurnal ini diterbitkan sebagai media komunikasi dan pengembangan ilmu yang dapat berupa naskah artikel laporan penelitian, artikel konseptual, artikel studi kasus maupun resensi buku, sepanjang relevan dengan misi jurnal. Setiap tulisan akan dinilai terlebih dahulu oleh mitra bebestari yang merupakan ahli dalam bidang hukum. Substansi artikel dalam Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum merupakan pendapat pribadi para penulisnya dan bukan merupakan representasi pendapat dari redaksi ataupun Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. Redaksi berhak mengedit naskah tanpa mengurangi makna tiap tulisan.

Susunan Redaksi

Editor Kehormatan

Prof. Dr. H. E. Saefullah Wiradipradja
Prof. Dr. Bagir Manan
Prof. Dr. Man Suparman Sastrawidjaja
Prof. Dr. Romli Atmasasmita
Prof. Dr. Veronica Komalawati
Prof. Dr. H. Eman Suparman
Prof. Huala Adolf, Ph.D
Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli

Pimpinan Redaksi

Atip Latipulhayat, Ph.D

Redaktur Pelaksana

Rachminawati, M.A

Editor Ahli

Yesmil Anwar, M.Si
Dr. Ali Abdurachman
Dr. An-an Chandrawulan
Dr. Hj. Efa Laela Fakhriah
Dr. Indra Perwira
Dr. Tarsisius Murwadji
Dr. Sigid Suseno

Dr. Hj. Sinta Dewi
Dr. Hernadi Affandi
Dr. Hj. Reny Supriyatni
Susi Dwi Harijanti, Ph. D
R. A. Gusman Catur Siswandi, Ph. D
Miranda Risang Ayu, Ph. D
Widati Wulandari, M. Crim

Editor

Irawati Handayani, LL.M

Sekretariat

Lailani Sungkar, M.H
Achmad Billy Zulqiyami, S.T
Agus Sumpena
Mentari Octovia
Nadya Meta Puspita
Wulan Kartikasari

Daftar Isi

Artikel Kehormatan

Saat Rakyat Bicara: Demokrasi dan Kesejahteraan

Bagir Manan, Susi Dwi Harijanti	1-18
---------------------------------------	------

Artikel

Kontroversi Pelarangan Ahmadiyah di Indonesia: Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)

Imral Rizki Rahim	19-37
-------------------------	-------

Perlindungan Hukum terhadap Pengetahuan Tradisional dengan Sistem Perizinan: Perspektif Negara Kesejahteraan

Wina Puspitasari	38-56
------------------------	-------

Penerapan Perjanjian Internasional di Pengadilan Nasional: Sebuah Kritik terhadap Laporan Delegasi Republik Indonesia kepada Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Implementasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik di Indonesia

Wisnu Aryo Dewanto	57-77
--------------------------	-------

Pemenuhan Hak atas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak dan Penerapannya Menurut Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya di Indonesia

Nia Kurniati	78-98
--------------------	-------

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk Melakukan Penyidikan dan Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Kerangka Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Sigid Suseno	99-115
--------------------	--------

Kewajiban Upaya Non Ajudikasi sebagai Syarat Mendaftarkan Gugatan Guna Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan (Tinjauan atas Perma No. 1 Tahun 2008)

Sufiarina & Efa Laela Fakhriah	116-134
--------------------------------------	---------

Problematika Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah dalam Hegemoni Dewan Perwakilan Rakyat

Hernadi Affandi	135-154
-----------------------	---------

Penerapan Perjanjian Internasional di Pengadilan Nasional : Sebuah Kritik terhadap Laporan Delegasi Republik Indonesia kepada Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Implementasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik di Indonesia*

Wisnu Aryo Dewanto⁵

Abstrak

Laporan Delri yang disampaikan oleh Pemerintah Indonesia kepada Komite Hak Asasi Manusia PBB menyatakan bahwa ICCPR telah menjadi bagian dari hukum nasional Indonesia sehingga substansi ICCPR dapat diterapkan secara langsung di pengadilan nasional tanpa memerlukan peraturan pelaksana. Selain itu, dikatakan pula bahwa Mahkamah Konstitusi telah merujuk secara langsung pada Pasal 2 ICCPR dalam beberapa putusannya seperti putusan untuk kasus Nomor 101/PUU-VII/2009 tentang Pengujian terhadap UU Advokat Nomor 18/2003 dan putusan untuk kasus Nomor 73/PUU-IX/2011 tentang Pengujian terhadap UU Pemda Nomor 32/2004 sebagaimana yang telah diamandemen oleh UU Nomor 12/2008. Sayangnya, Pasal 2 ICCPR tersebut pada kenyataannya tidak dapat diterapkan sebagai rujukan langsung dalam putusan-putusan pengadilan karena substansi pasal ini tidak mengatur hak dan kewajiban individu, tetapi negara. Pasal 2 ICCPR sebenarnya hanya ingin menjelaskan status hukum dari ICCPR bagi negara-negara pihak. Secara filosofis, Pasal 2 ICCPR menyatakan bahwa ICCPR bukanlah perjanjian internasional yang dapat diterapkan secara langsung di pengadilan nasional negara-negara pihak karena keberlakuannya memerlukan peraturan pelaksana, yaitu berupa undang-undang. Dalam praktiknya, Indonesia menganut model dualisme dengan pendekatan transformasi dalam penerapan perjanjian internasional di level nasional. Semua perjanjian internasional yang telah diratifikasi harus ditransformasikan ke dalam undang-undang agar dapat digunakan oleh hakim karena hakim hanya terikat oleh peraturan hukum yang dibuat oleh DPR dan perjanjian internasional hanya dapat diterapkan melalui metode interpretasi hukum.

Kata Kunci: *International Covenant on Civil and Political Rights*, Komite Hak Asasi Manusia, penerapan, pengadilan nasional, perjanjian *self-executing* dan *non-self-executing*.

The Implementation of International Treaties in Municipal Courts: A Critic to the Initial Report of the Indonesian Delegations to the United Nations Human Rights Committee regarding the Implementation of International Covenant on Civil and Political Rights in Indonesia

Abstract

The initial report, submitted by the Government of the Republic of Indonesia to the UN Human

* Artikel ini telah dipresentasikan dalam *The 2013 Padjadjaran Legal Conference*. Diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 22-24 Oktober 2013.

5 Dosen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Jl. Ngagel Jaya Selatan 169, Surabaya, wisnu@ubaya.ac.id dan wdewanto8@gmail.com, S.H. (Universitas Atma Jaya), LL.M (Macquarie University Australia), LL.M (University of Washington Amerika Serikat), Dr. (Universitas Gadjah Mada).

Rights Committee in 2013, stated that the ICCPR—which Indonesia has ratified, is part of the domestic law of Indonesia. It, therefore, can be directly applied in municipal courts without previous establishment of an implementing legislation. It has also been stated that the Constitutional Court of Indonesia has made a direct reference to the Article 2 of the ICCPR; for instance in the case Number 101/PUU-VII/2009 regarding judicial review on the Advocate Act Number 18/2003, and the case Number 73/PUU-IX/2011 regarding judicial review on the Regional Government Act Number 32/2004 as amended by the Act Number 12/2008. The writer argues that the Article 2 of the ICCPR cannot be used as a direct reference as the article is intended only to govern the rights and duties of states, not individuals. In other words, the ICCPR governs the rights and duties of the State Parties. Specifically, this article stipulates that the ICCPR is a non-self-executing treaty because it needs an implementing legislation for its implementation at the municipal level. The writer holds the opinion that Indonesia applies a model of dualism with a transformational approach to implement treaties in municipal courts. Consequently, all ratified treaties need to be transformed into Acts of Parliament in order to be implemented by judges because they are only bound by laws enacted by the Parliament (DPR). Hence, judges may apply international law through legal interpretation.

Keywords: *International Covenant on Civil and Political Rights, Human Rights Commission, implementation, municipal courts, self-executing & non-self-executing treaty.*

A. Pendahuluan

Laporan yang dibuat oleh Delegasi Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan Delri) kepada *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) Committee* mengenai implementasi ketentuan-ketentuan ICCPR di Indonesia menunjukkan ketidaksinkronan dalam memahami pengintegrasian *treaty* ke dalam sistem hukum Indonesia dan keberlakuan *ratified treaty* di pengadilan. Butir pertama menjelaskan bahwa, *“Provisions of the Covenant are directly applicable in domestic courts particularly in relation to the rights of every person subjected to criminal proceedings”*. Hak-hak tersebut sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Pasal 50-68. Tidak salah jika Delri berpedoman pada Pasal 7 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur bahwa, *“All international human rights law instruments which have been ratified by Indonesia will become part of the national law”*. Hal yang perlu dipahami adalah UU Nomor 39 Tahun 1999 merupakan *implementing legislation* dari ICCPR yang berarti bahwa UU ini ingin memberikan kekuatan hukum pada ICCPR untuk diterapkan di pengadilan Indonesia. Namun Delri sendiri menunjukkan sebuah keraguan apakah benar *ratified treaty* dapat diterapkan secara langsung di pengadilan karena dalam lanjutan kalimat pada butir kedua ditulis bahwa, *“However, the direct use of provisions from the Covenant is not yet a common practice”*.